

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Buruknya kinerja pelayanan publik antara lain dikarenakan belum dilaksanakan secara transparans dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Fredrik 2010). Dan menilai rendahnya kinerja birokrasi publik sangat dipengaruhi oleh budaya paternalisme masih sangat kuat dan cenderung mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorientasi pada kekuasaan dari pada pelayanan.

Kepuasan masyarakat merupakan faktor utama menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan suatu organisasi pemerintah termasuk pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Hal ini terjadi dikalangan masyarakat desa terkadang sistem birokrasi yang ada di pemerintahan desa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) harus selalu dilakukan secara berkala, artinya pada setiap periode waktu tertentu harus dilakukan penelitian atau perhitungan dan analisis terhadap kepuasan masyarakat akan pelayanan yang telah diberikan. Pada dasarnya

pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat sudah ditetapkan di dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara no. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelaksana instansi pemerintah. Salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan.

Desa merupakan hal sangat penting dalam pemerintahan, pembangunan antar desa dan kota selama ini tidak seimbang. Sehingga masyarakat lebih tertarik melakukan urbanisasi ke kota-kota besar untuk meningkatkan perekonomiannya ketimbang tinggal di desa. Hal ini menimbulkan masalah sangat besar terutama masalah kemiskinan yang semakin meningkat. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi kepentingan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar pada pembangunan desa agar tercapai kemakmuran. Suatu pembangunan negara harus berawal dari potensi kokoh yaitu pembangunan desa sampai pembangunan ke ibu kota. Dengan berkembangnya suatu desa maka akan meningkatkan perekonomian guna mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kota untuk mengadu nasib.

Dana desa adalah dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa memiliki peran sangat penting dalam peningkatan ekonomi desa, dengan pemanfaatan dan pengalokasian efektif dan efisien. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ketentuan umum pasal 1 ayat 12).

Kualitas pelayanan desa diharapkan akan menjadi lebih baik dibandingkan pada saat pengaturan sentralisasi, sehingga selalu dapat beradaptasi dengan kemajuan begitu cepat dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik positif dan berkualitas, akan menciptakan kepuasan, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, akhirnya dapat mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat. Sebelum dana desa disalurkan ke masing-masing desa, pembangunan infrastruktur masih sangat sulit untuk direalisasikan karena disebabkan oleh kekurangan dana, hal ini menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Upaya dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan

desa selalu terbentur pada jumlah dana sedikit dari pemerintah membuat masyarakat terbebani karena besarnya dana yang harus mereka tanggung, hal inilah menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap pelayanan yang ada di desa, meskipun dana desa sudah diberikan secara langsung oleh pemerintah namun pengelolaannya belum maksimal dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat desa setempat.

Desa Tampumia terletak di Kabupaten Luwu yang terdiri dari 5 dusun yaitu dusun Padang Rura, dusun Tampumia, dusun Pollo Salu, dusun Gantungan, dusun Bunne, pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya masih kurang efektif terutama di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan infrastruktur, bidang pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelompok PKK masih serba berkekurangan dan masih perlu evaluasi lebih lanjut agar semua program pemerintah terealisasi dengan baik.

Masyarakat desa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sangat terbatas diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur/jalan permukiman masyarakat desa belum dilakukan secara merata. Dan harus menjadi perhatian pemerintah desa adalah pembangunan infrastruktur jalan dan pemberdayaan sumber daya manusia tentunya biaya yang diperlukan sangat banyak terutama dana dari alokasi dana desa, apabila semua permasalahan yang ada bisa teratasi dengan baik dan maksimal maka semua keinginan masyarakat akan terpenuhi.

Permasalahan yang terjadi pada setiap desa dikarenakan tidak optimalnya pengelolaan alokasi dana desa mengakibatkan masyarakat kurang puas terhadap

pengelolaan alokasi dana desa, maka perlu adanya pengoptimalan peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan dan sinkronisasi aturan/regulasi melalui surat keputusan bersama serta mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang baik, diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa serta kepuasan masyarakat dapat tercapai secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan program ini dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati (PERBUP) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten Luwu tahun anggaran 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan mengikuti kebutuhan masyarakat desa. Selain itu diperlukan juga adanya kerjasama baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan alokasi dana desa juga harus melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, serta Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), semua stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Salah satu masalah besar yang hampir dialami setiap desa adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada pada masing-masing daerah/desa hal inilah menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap pengelolaan dana desa. Pembangunan desa selama ini, masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi atau dalam hal ini sangat terbatas. Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama untuk meningkatkan produktivitas kerja suatu desa, sehingga dapat melakukan pelayanan maksimal kepada masyarakat desa sehingga semua kebutuhan masyarakat terpenuhi dan masyarakat akan puas.

Alokasi dana desa (ADD) bersumber dari dana APBD akan membantu pembangunan sarana dan prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun akan datang dan akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh Pemerintah Pusat diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian.

Alokasi dana desa (ADD) ini berbanding terbalik dengan pengetahuan dan kesiapan aparat desa. Sehingga terjadi kesalahan bersifat administratif maupun substantif baik sengaja maupun tidak disengaja. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang untuk melakukan penelitian ini. Guna mendukung program pengembangan desa melalui Alokasi Dana Desa tersebut pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa cukup besar pada setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pengalokasian Dana Desa Pada APBN 2015 - 2017

No	Tahun anggaran	Jumlah anggaran	Rata-rata anggaran tiap desa
1	2015	Rp. 20,7 Triliun	Rp. 280.000.000
2	2016	Rp. 46,9 Triliun	Rp. 628.000.000
3	2017	Rp. 60 Triliun	Rp. 800.000.000

Sumber Data : Dana Desa- Kemenkeu (2015-2017)

Pada tabel diatas terlihat bahwa, alokasi dana desa dianggarkan pemerintah dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke setiap desa. Besaran alokasi dana desa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan sebagaimana yang terlihat pada

tabel, yaitu pada tahun 2015, alokasi dana desa hanya sebesar Rp.20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi dana desa sebesar Rp.280.000.000, sedangkan pada tahun 2017 alokasi dana desa yang diterima setiap desa sebesar Rp.60 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi dana desa sebesar Rp.800.000.000.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa telah terbukti menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit polindesa; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 10.405 drainase dan irigasi; 10.964 unit posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Berdasarkan pada sistem informasi desa, jumlah dana desa diterima dan digunakan Desa Tampumia dari tahun 2016 hingga 2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Anggaran Dana Desa Dari Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran Dana Desa	Jumlah Anggaran Dana Desa
1.	2016	Rp. 625.223.000
2.	2017	Rp. 766.873.000
3.	2018	Rp. 919.995.000
4.	2019	Rp. 1.095.569.000
5.	2020	Rp. 996.122.000

Sumber Data :Sipede Kemendesa (2020)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, jumlah anggaran dana desa yang diterima desa tampumia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pembangunan sarana/prasarana yang ada di desa tampumia, selain itu juga digunakan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan, membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa Tampumia.

Penggunaan dana desa diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentunya digunakan untuk pembangunan desa, pembangunan infrastruktur desa serta pembangunan sumber daya manusia dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, penyediaan fasilitas desa dan memberikan kepuasan kepada masyarakat akan manfaat dari alokasi dana desa tersebut.

Hasil dari realisasi alokasi dana desa Tampumia telah dinikmati masyarakat hingga saat ini diantaranya yaitu jalan desa, pembangunan fasilitas jamban umum/WC umum bagi keluarga kurang mampu, pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan posyandu, pembangunan jembatan, pembangunan dan pemeliharaan drainase, rabat beton jalan desa, pengerasan jalan dan pembangunan jalan usaha tani desa.

Penelitian yang membahas tentang indeks kepuasan masyarakat terhadap alokasi dana desa tentunya sudah sangat banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya dan hasil dari penelitian dilakukan masing-masing memiliki perbedaan. Seperti pada penelitian Dessy Riani (2014-2017) mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan dihadapi dan teori menurut para ahli bahwa dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis berupa belum lengkapnya RAB sesuai dengan standar proyek dan tidak adanya pedoman serta petunjuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan, rendahnya sumber daya manusia, kurang dipahaminya SOP telah ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan, masih rendahnya sikap kesungguhan pelaksanaan masih rendah, pengalaman masih minim dan keterbatasan sumber anggaran dimiliki pemerintah desa dan hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan infrastruktur di desa cileungsir kabupaten Ciamis. Sedangkan pada penelitian Fandi Alfiansyah Siregar S.Sos (2018) mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada pada tingkat baik dan cukup memberikan kepuasan pada masyarakat, Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 14 (Empat belas) unsur IKM sebesar 2,94 dan dengan nilai konversi IKM sebesar 73,50 dan berarti bahwa indeks kepuasan masyarakat berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap**

Realisasi Alokasi Dana Desa Di Desa Tampumia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang, maka perlu pembahasan khusus dalam penelitian ini. Maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

Apakah indeks kepuasan masyarakat berpengaruh terhadap realisasi alokasi dana desa di desa Tampumia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk Mengetahui pengaruh indeks kepuasan masyarakat terhadap alokasi dana desa di desa Tampumia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai kepuasan masyarakat terhadap alokasi dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Universitas Muhammadiyah Palopo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan kemampuan intelektual dan dapat memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan teori dan praktik terkhusus dalam Ekonomi Pembangunan mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.1.2 Bagi Instansi Bersangkutan

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menjadi salah satu bahan acuan agar pengelolaan alokasi dana desa dapat disalurkan dengan baik dan secara transparan.

1.4.1.3 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam mempraktikkan dan menerapkan ilmu pengetahuan diperoleh di bangku perkuliahan, khususnya memberikan gambaran mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

1.5 sistematika

BAB I. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka, terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

Bab III. Metode penelitian terdiri dari desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, uji validitas dan reliabilitas, dan analisis data.

Bab IV. Hasil dan Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V. Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berupa ringkasan sederhana dari sumber, tetapi biasanya memiliki pola organisasi dan menggabungkan ringkasan dan sintesis. Penulisan tinjauan pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi cara baru untuk menafsirkan penelitian sebelumnya, mengungkapkan setiap celah yang ada dalam literatur, menyelesaikan konflik di antara penelitian sebelumnya yang tampaknya saling bertentangan.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tingkat kepuasan masyarakat

Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Menurut Harbani Pasolong (2010), “semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat (*high trust*)”.

Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa puas akan pelayanan tersebut. KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik menyebutkan bahwa, “ ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan pelayanan dicapai penerima pelayanan yang memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

a) Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah perlu terus diukur dan dibandingkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah adalah dengan menggunakan indeks kepuasan masyarakat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah menyebutkan indeks kepuasan masyarakat adalah: “Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya”.

Lebih lanjut dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara (KEPMENPAN) Nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menyebutkan, “sasaran dari indeks kepuasan masyarakat adalah tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan masyarakat adalah data informasi mengenai tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan diberikan oleh sebuah instansi pemerintahan.

b) Maksud Dan Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat

Keseluruhan kegiatan dilakukan oleh organisasi atau instansi pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang diberikan. Indeks kepuasan masyarakat sebagai indikator kepuasan masyarakat

disusun guna mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap ADD (alokasi dana desa) atas pelayanan diberikan oleh pemerintah desa. Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara (KEPMENPAN) Nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat menyatakan bahwa: “pedoman penyusunan indeks kepuasan dimaksud sebagai acuan bagi unit pelayanan pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, sehingga indeks kepuasan masyarakat disusun dapat menunjukkan nilai kepuasan masyarakat secara keseluruhan”.

c) Manfaat Indeks Kepuasan

Indeks kepuasan masyarakat disusun dari unit pelayanan pemerintah agar memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi instansi pemerintah sendiri. Secara umum manfaat indeks kepuasan masyarakat yaitu sebagai alat untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan sebuah instansi pemerintah, berdasarkan tingkat kinerja penyelenggaraan tersebut dapat ditentukan berbagai kebijakan dalam hal pelayanan.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 4 alokasi dana desa dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi kabupaten/kota tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus seharusnya disalurkan ke desa.

Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 Dana Desa bersumber pada APBN bahwa Dana Desa adalah dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukan bagi desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Nurcholis (2011) beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: 1) menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2) meningkatkan pendapatan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3) meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 4) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan 8) meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Berdasarkan peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut :

- a) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b) Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- c) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa dipisahkan.

2.1.3 Tujuan Alokasi Dana Desa :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b) Kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- c) Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- d) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong;

2.1.4 Tata Cara Penyaluran Dana Desa

Penyaluran untuk Alokasi Dana Desa ke Desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan diamanatkan oleh peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 99 ayat (1) dan selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati. Penyaluran Alokasi Dana Desa harus mempertimbangkan estimasi kemampuan rekening Kas Untuk Umum Daerah (RKUD). Adapun tahapan penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

- 1) Tahap I pada Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen)
- 2) Tahap II pada Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen)
- 3) Tahap III pada Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen)
- 4) Tahap IV pada Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen)

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Wahyudin Sumpeno (2011) menyatakan bahwa APB-Desa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa ditetapkan berdasarkan peraturan desa mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung program kebutuhan desa bersangkutan. Pendapatan dan belanja bersumber dari rekening desa dalam satu tahun. Baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis yaitu :

a. Manfaat APB-Desa

Manfaat penyusunan APB-Desa menurut Wahjudin Supeno (2011) adalah sebagai berikut:

- 1) APB-Desa sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- 2) Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- 3) Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain dari luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- 4) Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan telah ditetapkan.
- 5) Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa.

- 6) Gambaran mengenai arahan kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran. Memberi izin terhadap modal penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance*.
- 7) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

Pemerintah desa harus memiliki Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu diantaranya sebagai berikut :

a) Perencanaan

Perencanaan mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa harus dibuat semaksimal mungkin, kepala desa membuat dan menyampaikan rancangan APB-Desa dan dibahas oleh badan permusyawaratan desa untuk mencapai kesepakatan paling lambat bulan oktober bulan berjalan. Rancangan APBDesa telah disepakati dan dilaporkan oleh kepala desa melalui camat kepada bupati /walikota paling lambat 3 hari. Selanjutnya bupati akan melakukan evaluasi kerja paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan kerja APBDesa. Jika bupati tidak melakukan evaluasi kerja dalam jangka waktu tersebut maka peraturan desa akan berlaku dengan sendirinya. Namun jika ada evaluasi kinerja disampaikan maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari sejak diterimanya.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti kepala desa tetap menerapkan rancangan APBDesa menjadi peraturan desa maka camat dapat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati. Jika hal ini terjadi maka secara

otomatis pada APBDesa tahun anggaran sebelumnya berlaku dan akan berdampak pada pengeluaran hanya dapat dilakukan terhadap operasional pemerintahan.

b) Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti lengkap dan sah.

c) Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban secara keseluruhan dilakukan oleh kepala desa selaku ketua tim pelaksanaan pemerintahan desa. Bentuk dan pertanggungjawaban secara administratif sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.113 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

- 4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- 5) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - a. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah masuk desa.
- d) Pengawasan Anggaran Dana Desa (ADD)

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku. Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan alokasi dana desa memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran akan dicapai dan efektivitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

Bentuk dari pengendalian pelaksanaan ADD adalah dengan pengawasan dan pelaporan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak bersangkutan maka perencanaan telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan diharapkan akan sulit terwujud.

Pola pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh :

- a) Pengawasan fungsional dilakukan oleh inspektorat kabupaten ;
- b) Pengawasan teknik dilakukan tim fasilitas kabupaten dan tim pendamping kecamatan;

c) Pengawasan operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahap pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain :

- a) Proses perencanaan, terkait dengan proses pembentukan tim pelaksana.
- b) ADD dan perencanaan penggunaan ADD dilaksanakan pada skala prioritas pembangunan desa;
- c) Proses pencairan dana ADD dan penyerahan kepada masing-masing pengelola telah ditetapkan sebelumnya;
- d) Proses pelaksanaan kegiatan mendapat dan dari ADD
- e) Jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tata tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD.
- f) Berpedoman pada prinsip pengelolaan ADD, maka setiap proyek fisik mendapat dana dari ADD, kepala desa wajib menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD sebagai pelaksana, dan dapat memasang papan nama proyek sebagai media informasi kepada publik sebelum proyek tersebut dilaksanakan.
- g) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh tim pendamping kecamatan dengan ketentuan :
 - 1) Melaporkan setiap permasalahan ada kepada bupati melalui tim fasilitas kabupaten terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan ADD;

- 2) Apabila hasil penelitian awal mengidentifikasi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 113 tahun 2014 pasal 44 menyatakan bahwa :

- a) Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepala Desa.
- b) Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber lampau dari hasil penelitian nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian akan dilakukan. Tujuan adanya penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian adalah agar keilmuan telah dilakukan oleh ilmuwan terdahulu bisa diteruskan dan menghasilkan penelitian baru, sehingga setiap solusi yang ada bisa bermanfaat. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga melihat beberapa rujukan dari jurnal dan skripsi orang lain memiliki kemiripan tema namun juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/judul/tahun	Variabel/ metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Fandi Alfiansyah Siregar S.Sos. Analisis kepuasan masyarakat terhadap alokasi dana desa Bonia Hilisimaetano kecamatan Maniamolo kabupaten Nias selatan (2018).	X : Kepuasan masyarakat Y : Alokasi dana desa Metode pengumpulan data digunakan yaitu Metode Deskriptif.	Hasil dari penelitian ini yaitu kepuasan masyarakat berpengaruh terhadap alokasi dana desa di desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo kabupaten Nias selatan.
2.	Nunuk Riani. Analisis pengelolaan dana desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo) Tahun (2016).	Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.
3.	Icha Shintia Dewi. Analisis pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam (2019).	X : Pengelolaan dana desa Y : Kepuasan masyarakat Metode yang digunakan yaitu kualitatif.	Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

4.	Abdul Wahid, Farid, Abdul Rahman. Analisis kinerja pengelola alokasi dana desa di desa Sibualong kecamatan Balaesang kabupaten Donggala (2018).	Variabel yang digunakan yaitu Kinerja pengelola alokasi dana desa. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas penggunaan dana desa di bidang pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan telah tercapai.
5.	Marselina. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Magmagan Karya (2018)	X : Pengelolaan alokasi dana desa Y : Peningkatan ekonomi masyarakat Metode digunakan yaitu metode kualitatif.	Hasil penelitian yaitu pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014.
6.	Dessi Riani. Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis (2017).	menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Hasil penelitian bahwa Indeks kepuasan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis secara umum masih rendah

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

7.	Riski Ulfa Nasilah. Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya, 2018).	Pengalokasian Dana Desa. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif.	Hasil penelitian ini yaitu pengalokasian dana desa dapat dikatakan efektif karena pembangunan telah dilaksanakan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kegiatan pelatihan dilakukan mendapat respon positif dari masyarakat setempat khususnya ibu-ibu yang berprofesi sebagai IRT.
8.	Anggalih Bayu Muh Kamim, M. Rusmul Khandiq, Rama Shidqi. Alokasi Dana Desa dan Realisasi: Studi Kasus Atas Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2016-2017.	Penelitian dilakukan dengan metode library research dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi terhadap laporan-laporan kinerja pemerintah daerah.	Hasil penelitian ini yaitu analisis praktik akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sleman masih kurang baik.

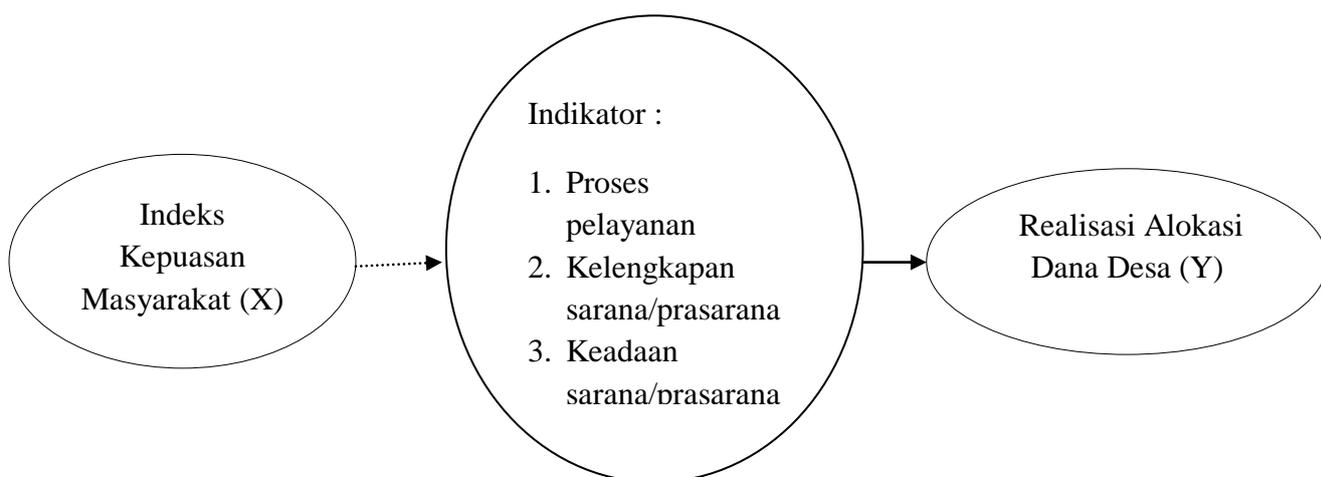
Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

9.	Analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan indeks kepuasan masyarakat (ikm) kantor kecamatan sawan kabupaten buleleng (2019).		Hasil penelitian ini yaitu Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan Sawan diukur berdasarkan kepuasan masyarakat menggunakan IKM secara total dari 14 indikator pelayanan pada rentang nilai IKM 2,51-3,25 dengan nilai konversi IKM pada rentang 62,51-81,25 yang berada pada kategori mutu pelayanan dan kinerja pelayanan baik.
10.	Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (studi pada desa wonorejo kecamatan singosari kabupaten malang) 2012.	Pengelolaan alokasi dana desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat.

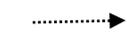
2.3 Kerangka konseptual

Kerangka pikir atau kerangka konseptual adalah gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Menurut Sugiyono (2014) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan Gambar :

-  = Variabel Yang Diteliti
-  = Pengaruh
-  = Tidak ada pengaruh (indikator)

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan pada kerangka konseptual diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

“Diduga bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Berpengaruh Terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Tampumia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah metode digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian memberikan arah terhadap jalannya penelitian (Dharma, 2013). Desain penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis berkaitan dengan fenomena alam.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Target utama dalam penelitian ini yakni di Desa Tampumia Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat terhadap realisasi alokasi dana desa di desa Tampumia. Adapun waktu penelitian dibutuhkan kurang lebih 2 bulan yaitu bulan Juni hingga bulan Agustus 2021.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik dimana peneliti ingin membuat opini berdasarkan statistik sampel (Uma Sakaran dan Roger Bougie 2017). Adapun populasi digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat dusun Padang Rura yang menikmati hasil dari Realisasi Alokasi Dana Desa, jumlah populasi yang di gunakan dalam peneliti ini yaitu 1225 jiwa (Jumlah Penduduk Desa Tampumia).

Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa yang dipilih dari populasi (Uma Sekaran 2013). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) diinginkan. Jumlah sampel dapat pula ditentukan dengan menggunakan rumus slovin (1960) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 2% (0,02) atau 5% (0,05) atau 10% (0,1). Maka pengujian pengambilan sampel sebagai berikut :

Diketahui : $N = 1225$

$$e = 10\% \text{ atau } 0,1$$

$$\text{Penyelesaian : } n = \frac{1225}{1+1225 \times (0,1^2)}$$

$$n = 92$$

Berdasarkan hasil diatas, jumlah sampel 92 maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 92 jiwa.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Ada beberapa jenis dan sumber data digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.4.1 Data primer

Data primer merupakan data dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Data primer juga adalah data belum pernah dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan, data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah data atau informasi diperoleh langsung dari masyarakat serta para pengelola dana desa di desa Tampumia.

3.4.2 Data sekunder

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti mengumpulkan data melalui informasi secara tertulis, gambar-gambar dan bagan-bagan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder dari penelitian ini yaitu data mengenai kepala desa, data mengenai pengelolaan alokasi dana desa, undang-undang No.6 tahun 2014, jurnal penelitian, proposal skripsi dan skripsi serta sumber pustaka lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan adanya data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini data diperoleh dari berbagai sumber. Untuk memperoleh data relevan dengan masalah dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk memperoleh keterangan dari jumlah responden.

Instrumen yang diberikan kepada responden dengan menggunakan teknik skala liter 5 poin untuk mengukur variabel penelitian. Respondennya akan memilih jawaban dari pertanyaan atau pernyataan positif dengan jawaban yang ada, yaitu sebagai berikut :

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)

TS : Tidak Setuju (Skor 2)

KS : Kurang Setuju (Skor 3)

S : Setuju (Skor 4)

SS : Sangat Setuju (Skor 5)

3.5.2 Pengamatan (observasi)

Hal ini merupakan teknik dalam penelitian non tes, observasi dilakukan dengan pengamatan jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya dalam keadaan tertentu. Observasi ini digunakan ketika data akan diambil berkenaan dengan perilaku manusia, gejala-gejala alam dan responden diamati tidak terlalu besar dan sasaran observasi meliputi tiga hal yaitu pelaku, tempat dan kegiatan. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data lebih orisinil dan lengkap agar sesuai dengan hasil wawancara.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dan definisi operasional dalam penelitian ini adalah suatu atribut atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2015). Definisi operasional biasa digunakan agar tidak menimbulkan penafsiran ganda yaitu

dengan diberikan batasan-batasan terhadap variabel yang ada di dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. Kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat desa tampumia terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa beserta dengan aparatnya masih perlu ditingkatkan lagi agar kepuasan masyarakat terpenuhi sehingga indeks kepuasan masyarakat desa tampumia pengukuran ini diukur dengan indikator :

- 1) Proses pelayanan
- 2) Kelengkapan sarana dan prasarana
- 3) Keadaan fisik sarana dan prasarana

2. Realisasi alokasi dana desa

Realisasi alokasi dana desa adalah pelaksanaan atau pengalokasian anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang bersumber dari bagi hasil pajak keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana desa yang diterima desa tampumia pengelolaannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan pembangunan yang dilaksanakan harus merata, terencana dan pengelolaannya harus transparan serta terbuka kepada masyarakat agar masyarakat percaya, Pengukuran ini diukur dengan indikator :

- 1) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa
- 2) Bantuan sosial dan bantuan keuangan
- 3) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa

3.7 Pengujian Instrumen

Uji Validitas dan Reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah suatu kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut sugiyono (2012) menyatakan bahwa valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan instrumen reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, dan menghasilkan data yang sama.

3.7.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 28, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika r hitung $>$ r tabel maka pernyataan/pertanyaan dinyatakan valid
2. Jika r hitung $<$ r tabel maka pernyataan/pertanyaan dinyatakan tidak valid

3.7.2 Uji Reliabilitas

Digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsis

ten jika pengukuran tersebut diulang. Metode yang digunakan adalah metode Cronbach's Alpha (Juliansyah Noor, 2012) Metode ini diukur berdasarkan skala alpha Cronbach 0 sampai 1. Jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rentang yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d 0,20, berarti sangat tidak reliabel
2. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d 0,40, berarti tidak reliabel
3. Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d 0,60, berarti cukup reliabel
4. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80, berarti reliabel
5. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d 1,00, berarti sangat reliabel

3.8 Metode Analisis Data

1.8.1 Analisis Deskriptif

Merupakan suatu analisis yang menguraikan tanggapan responden mengenai indeks kepuasan masyarakat terhadap realisasi alokasi dana desa di desa tampumia melalui kuesioner yang dibagikan kepada setiap responden.

3.8.2 Regresi Linear Sederhana

Analisis linear adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian

menggunakan analisis regresi linear sederhana yaitu melihat pengaruh analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap realisasi alokasi dana desa.

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Realisasi alokasi dana desa

X = Kepuasan masyarakat

a = Konstanta (nilai dari Y apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (pengaruh positif atau negatif)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Letak Geografis, Batas Dan Luas Wilayah

Penelitian ini dilakukan di desa tampumia yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, dengan luas wilayah desa Tampumia adalah 85,14km² jika ditinjau dari segi geografis merupakan salah satu desa yang sangat potensial dalam hal pengembangan pertanian khususnya petani sawah. Desa Tampumia terletak pada posisi 115.7.20 LS 8.7.10 BT, dengan ketinggian kurang lebih 250 m² diatas permukaan laut. Batas-batas wilayah desa tampumia yaitu :

Sebelah Utara : Desa Tampa

Sebelah Barat : Desa Pangi

Sebelah Selatan : Desa Padang Ma'bud

Sebelah Timur : Desa Salu Induk

Desa tampumia terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Tampumia dengan jumlah penduduk 323 jiwa, Dusun Padang Rura dengan jumlah penduduk 348 jiwa, Dusun Gantungan dengan jumlah penduduk 214 jiwa, Dusun Pollo Salu dengan jumlah penduduk 311 jiwa dan Dusun Bunne dengan jumlah penduduk 29 jiwa. Penduduk

yang ada di setiap dusun memiliki bahasa dan daerah asal yang masing-masing berbeda dan mayoritas bahasa yang digunakan di desa tampumia yaitu bahasa luwu dan bahasa bugis walaupun di dalam masyarakat terdapat banyak perbedaan baik dari segi bahasa, kultur budaya dan agama tetapi masyarakat desa tampumia tetap hidup rukun, saling menghargai perbedaan dan saling toleransi dan saling tolong meolong dalam kebaikan. Adapun data demografi penduduk Desa Tampumia berdasarkan populasi per wilayah yaitu :

Table 4.1 Demografi berdasarkan populasi per wilayah

No	Nama dusun	Nama kepala dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Lk	Pr
1.	Tampumia	Leo Adnan.M	1	94	323	168	155
2.	Padang Rura	Husain	1	98	348	198	150
3.	Gantungan	Irfan	1	57	214	117	97
4.	Pollo Salu	Sunandar	1	85	311	158	153
5.	Bunne	Daniel	1	10	29	11	18
TOTAL			5	342	1225	632	573

Sumber : Sistem Informasi Desa Tampumia (2020).

Jumlah penduduk Desa Tampumia secara keseluruhan yaitu 1225 jiwa yang terbagi di setiap dusun, di Dusun Tampumia jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 95 kepala keluarga dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tercatat sebanyak 168 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan tercatat sebanyak 155 jiwa dan jumlah keseluruhan penduduk yaitu 323 jiwa, Dusun

Padang Rura jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 98 kepala keluarga dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tercatat sebanyak 198 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan tercatat sebanyak 150 jiwa dan jumlah keseluruhan penduduk tercatat sebanyak 348 jiwa, Dusun Gantungan jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 57 kepala keluarga dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tercatat sebanyak 117 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan tercatat sebanyak 97 jiwa dan jumlah keseluruhan penduduk tercatat sebanyak 214 jiwa, Dusun Pollo Salu jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 85 kepala keluarga dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tercatat sebanyak 158 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan tercatat sebanyak 153 jiwa dan jumlah keseluruhan penduduk tercatat sebanyak 311 jiwa dan Dusun Bunne jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 10 kepala keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 11 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan tercatat sebanyak 18 jiwa dan jumlah keseluruhan penduduk tercatat 29 jiwa.

4.1.2 Visi Dan Misi Desa Tampunia

a. Visi Desa Tampunia

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa tampunia yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

b. Misi Desa Tampumia

Desa tampumia mempunyai misi pembangunan jangka panjang dalam waktu 2019-2025 yaitu :

1. pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) umum yang memadai
2. Mendorong kemajuan sektor usaha dan menengah
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai warga negara
4. Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, seni, budaya, dan olahraga
5. Melaksanakan pembangunan desa secara transparan, efektif, efisien, demokratis dan accountable akan kegiatan pembinaan keagamaan, seni, budaya dan olahraga.

4.1.3 Potensi Alam dan kondisi penduduk Desa Tampumia

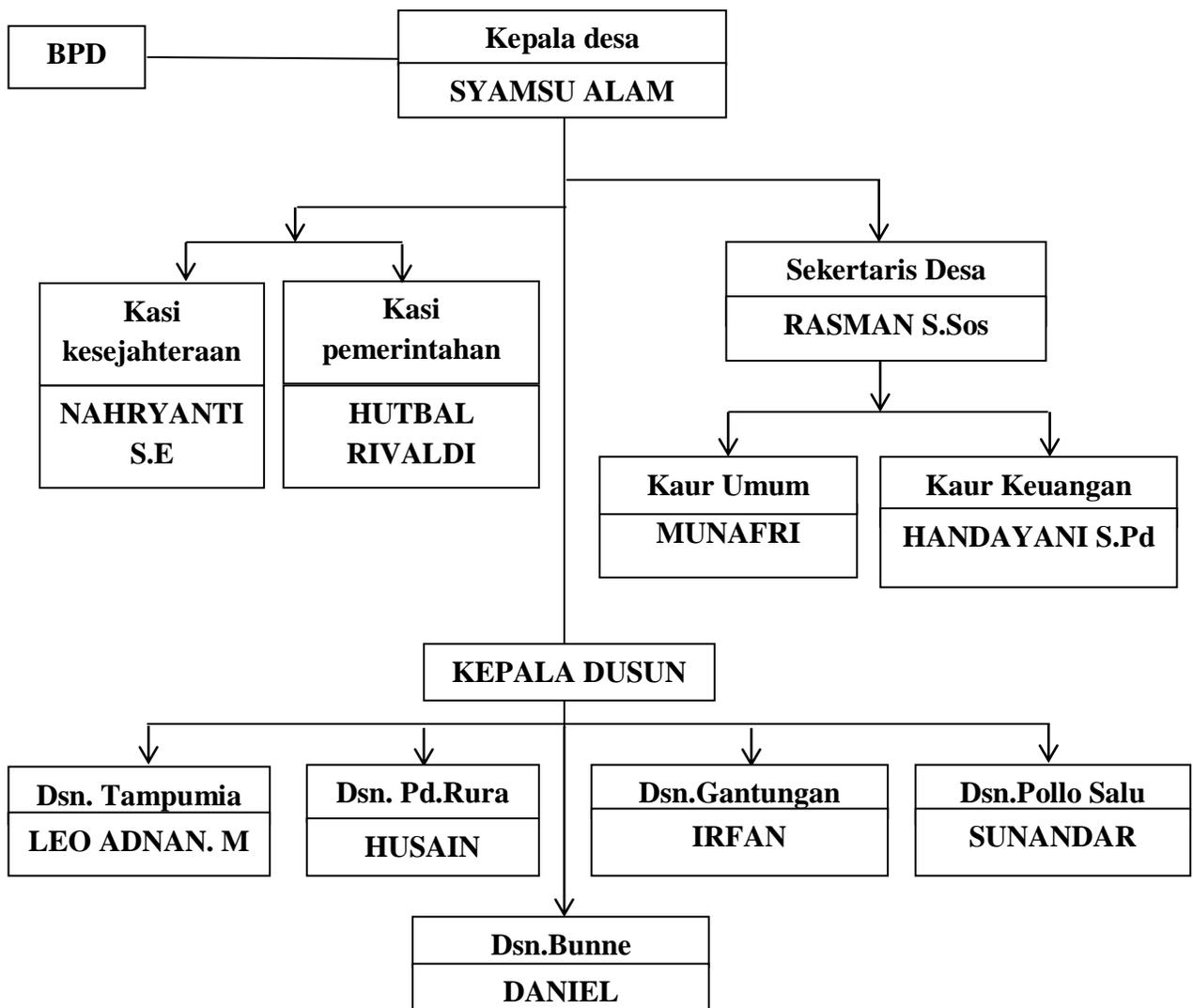
Desa tampumia memiliki potensi alam yang sangat beragam dan melimpah salah satunya yaitu sumber air yang berada di pegunungan desa tampumia, dan juga memiliki air terjun yang seringkali dikunjungi oleh warga masyarakat desa maupun penduduk dari desa lain dan luar daerah. Penduduk desa tampumia pada umumnya bekerja sebagai petani kebun, petani sawa dan hal inilah yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian penduduk desa tampumia untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari 50% kawasan desa tampumia merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh pemerintah, agar fungsi hutan tersebut

tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, 35% merupakan tanah perkebunan termasuk di dalamnya milik pemda TK I Sulsel seluas 15 hektar. 10% merupakan tanah sawah dengan sistem irigasi semi teknik, dan 5% adalah tanah pemukiman dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dikelola oleh masyarakat di desa tampumia dan juga digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Desa Tampumia

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tampumia



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan diolah untuk mengetahui Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa Di Desa Tampumia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 92 kuesioner untuk memperoleh data berupa tanggapan responden terhadap variabel penelitian. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tampumia. Data tentang karakteristik responden dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur/Usia

		Umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-29 tahun	48	52.2	52.2	52.2
	30-39 tahun	9	9.8	9.8	62.0
	40-49 tahun	9	9.8	9.8	71.7
	50-59 tahun	26	28.3	28.3	100.0
	Total	92	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan tabel 4.2.1 diatas menunjukkan bahwa responden dengan umur/usia 20-29 tahun sebanyak 48 orang, responden dengan umur/usia 30-39 tahun sebanyak 9 orang, responden dengan umur/usia 40-49 tahun sebanyak 9 Orang dan

responden dengan umur/usia 50-59 tahun sebanyak 26 orang. Dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi yaitu umur 20-29 tahun.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	46	50.0	50.0	50.0
	Perempuan	46	50.0	50.0	100.0
	Total	92	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olah Data 2021

Dari tabel 4.2.2 tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang atau sekitar 50 persen orang atau dari keseluruhan jumlah responden, dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 46 orang atau sekitar 50 persen atau dari keseluruhan dari jumlah responden. Hal ini membuktikan bahwa pengambilan responden dalam penelitian ini tidak melihat tau menilai dari jenis kelamin seseorang.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	23	25.0	25.0	25.0
	SMP	12	13.0	13.0	38.0
	SMA	51	55.4	55.4	93.5

	SMK	2	2.2	2.2	95.7
	S1	4	4.3	4.3	100.0
	Total	92	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olah Data 2021

Dari tabel 4.2.3 tentang karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berpendidikan terakhir SD sebanyak 23 orang dari keseluruhan jumlah responden, responden yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 12 orang dari keseluruhan jumlah responden, responden yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 51 orang dari keseluruhan jumlah responden, responden yang berpendidikan terakhir SMK sebanyak 2 orang dari keseluruhan jumlah responden, responden yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 4 orang dari keseluruhan jumlah responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

4.3 Hasil Deskripsi Jawaban Responden

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen (X) Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat dan variabel dependen (Y) Realisasi Alokasi Dana Desa. Dalam kuesioner digunakan alat pengukur berupa skala likert yaitu :

Sangat setuju (SS) : Skor 5

Setuju : Skor 4

Kurang Setuju : Skor 3

Tidak Setuju : Skor 2

Sangat tidak setuju : Skor 1

Berikut ini jumlah hasil dari distribusi frekuensi jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 4.5
Variabel Indeks Kepuasan Masyarakat (X)

Item	SS		S		KS		TS		STS		Total persen
1.	5	5,4%	61	66,3%	24	26,1%	2	2,2%	-	-	100
2.	5	5,4%	46	50,0%	39	42,4%	1	1,1%	-	-	100
3.	14	15,2%	54	58,7%	23	25,0%	1	1,1%	-	-	100
4.	12	13,0%	67	72,8%	13	14,1%	-	-	-	-	100
5.	17	18,5%	58	63,0%	17	18,5%	-	-	-	-	100
6.	12	13,0%	63	68,5%	17	18,5%	-	-	-	-	100
7.	11	12,0%	57	62,0%	23	25,0%	1	1,1%	-	-	100
8.	19	20,7%	56	60,9%	15	16,3%	1	1,1%	1	1,1%	100
9.	16	17,4%	55	59,8%	20	21,7%	1	1,1%	-	-	100
10.	20	21,7%	57	62,0%	15	16,3%	-	-	-	-	100

Sumber : Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan data diatas, variabel independen yang terdiri dari sub variabel Indeks Kepuasan Masyarakat (X) pada item pertama yang membahas tentang

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa dan aparat desa memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan publik, dari 92 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 5 responden atau sekitar 5,4 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 61 responden atau sekitar 66,3 persen yang menjawab setuju (S), 24 responden atau sekitar 26,1 persen yang menjawab kurang setuju (KS), 2 responden atau sekitar 2,2 persen yang menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS),

Item kedua yang membahas tentang pemerintah desa dan aparat desa memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dari 92 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 5 responden atau sekitar 5,4 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 46 responden atau sekitar 50 persen yang menjawab setuju (S), 39 responden atau sekitar 42,2 persen yang menjawab kurang setuju (KS), 1 responden atau sekitar 1,1 persen yang menjawab tidak setuju (TS), dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS).

Item ketiga yang membahas tentang pemerintah desa dan aparat bersikap sopan dan ramah dalam melayani masyarakat, dari 92 kuesioner yang dibagikan sebanyak 14 responden atau sekitar 15,2 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 54 responden atau sekitar 58,7 persen yang menjawab setuju (S), 23 responden atau sekitar 25,0 persen yang menjawab kurang setuju (KS), 1 responden atau sekitar 1,1 persen yang menjawab tidak setuju (TS), dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS).

Item keempat yang membahas tentang pemerintah desa dan aparat desa memberikan perlakuan yang sama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan, dari 92 kuesioner yang dibagikan sebanyak 12 responden atau sekitar 13,0 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 67 responden atau sekitar 72,8 persen yang menjawab setuju (S), 13 responden atau sekitar 14,1 persen yang menjawab kurang setuju (KS), dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item kelima yang membahas tentang pemerintah desa dan aparat desa memiliki ketelitian dalam bekerja, khususnya ketika melayani permintaan masyarakat terkait pelayanan keadministrasian, dari 92 kuesioner yang dibagikan sebanyak 17 responden atau sekitar 18,5 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 58 responden atau sekitar 63,0 persen yang menjawab setuju (S), 17 responden atau sekitar 18,5 persen yang menjawab kurang setuju (KS), dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item keenam yang membahas tentang program yang dibuat pemerintah desa memiliki tujuan untuk membantu kebutuhan masyarakat, dari 92 kuesioner yang dibagikan sebanyak 12 responden atau sekitar 13,0 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 63 atau sekitar 68,5 persen yang menjawab setuju (S), 17 responden atau sekitar 18,5 persen yang menjawab kurang setuju (KS), dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item ketujuh yang membahas tentang sarana dan prasarana yang ada di desa tampumia sangat lengkap, dari 92 kuesioner yang dibagikan sebanyak 11 responden atau sekitar 12,0 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 57 responden atau sekitar 62,0 persen yang menjawab setuju (S), 23 responden atau sekitar 25,0 persen yang menjawab kurang setuju (KS), 1 responden atau sekitar 1,1 persen yang menjawab tidak setuju (TS), dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS).

Item kedelapan yang membahas tentang kelengkapan sarana dan prasarana desa telah dinikmati oleh semua masyarakat desa, dari 92 kuesioner yang dibagikan sebanyak 19 responden atau sekitar 20,7 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 56 responden atau sekitar 60,9 persen yang menjawab setuju (S), 15 responden atau sekitar 16,3 persen yang menjawab kurang setuju (KS), 1 responden atau sekitar 1,1 persen yang menjawab tidak setuju (TS), 1 responden atau sekitar 1,1 persen yang menjawab sangat tidak setuju (STS).

Item kesembilan yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan, dari 92 kuesioner yang dibagikan sebanyak 16 responden atau sekitar 17,4 yang menjawab sangat setuju (SS), 55 responden atau sekitar 59,8 persen yang menjawab setuju (S), 20 responden atau sekitar 21,7 yang menjawab kurang setuju (KS), 1 responden atau sekitar 1,1 persen yang menjawab tidak setuju (TS), dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS).

Tabel 4.6
Realisasi Alokasi Dana Desa (Y)

Item	SS		S		KS		TS		STS		Total persen
1.	7	7,6%	64	69,6%	20	21,7%	-	-	1	1,1%	100
2.	12	13,0%	57	62,0%	23	25,0%	-	-	-	-	100
3.	20	21,7%	52	56,5%	18	19,6%	2	2,2%	-	-	100
4.	18	19,6%	53	57,6%	20	21,7%	1	1,1%	-	-	100
5.	19	20,7	54	58,7%	17	18,5%	2	2,2%	-	-	100
6.	17	18,5%	56	60,9%	19	20,7%	-	-	-	-	100
7.	22	23,9%	48	52,2%	22	23,9%	-	-	-	-	100

Sumber : Hasil Olah Data Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, variabel independen yang terdiri dari sub variabel realisasi alokasi dana desa (Y), pada item pertama membahas tentang adanya musyawarah rencana pembangunan alokasi dana desa dari 92 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 7 responden atau sekitar 7,6 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 64 responden atau sekitar 69,6 persen yang menjawab setuju (S), 20 responden atau sekitar 21,7 persen yang menjawab kurang setuju (KS), tidak ada responden yang menjawab tidak setuju (TS), dan 1 responden atau sekitar 1,1 persen yang menjawab sangat tidak setuju (STS).

Item kedua yang membahas tentang adanya informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa dari 92 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 12 responden atau sekitar 13,0 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 57 responden atau sekitar 62,0 persen yang menjawab setuju (S), 23 responden atau sekitar 25,0% yang menjawab kurang setuju (KS), dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item ketiga yang membahas tentang adanya keterbukaan mengenai hasil realisasi alokasi dana desa dari 92 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 20 responden atau sekitar 21,7 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 52 responden atau sekitar 53,6 persen yang menjawab setuju (S), 18 responden atau sekitar 19,6 persen yang menjawab kurang setuju (KS), 2 responden atau sekitar 2,2 persen yang menjawab tidak setuju (TS), dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS).

Item keempat yang membahas tentang adanya laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan alokasi dana desa dan realisasi belanja alokasi dana desa dari 92 kuesioner yang dibagikan 18 responden atau sekitar 19,6 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 53 responden atau sekitar 57,6 persen yang menjawab setuju (S), 20 responden atau sekitar 21,7 persen yang menjawab kurang setuju (KS), 1 responden atau sekitar 1,1 yang menjawab tidak setuju (TS), dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS).

Item kelima membahas tentang masyarakat ikut memberi masukan/solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam alokasi dana desa dari 92 kuesioner yang dibagikan, 19 responden atau sekitar 20,7 yang menjawab sangat setuju (SS), 54 responden atau sekitar 58,7 yang menjawab setuju (S), 17 responden atau sekitar 18,5 yang menjawab kurang setuju (KS), 2 responden atau sekitar 2,2 persen yang menjawab tidak setuju (TS), dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS).

Item keenam yang membahas tentang pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa dari 92 kuesioner yang dibagikan, 17 responden atau sekitar 18,5 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 56 responden atau sekitar 60,9 persen yang menjawab setuju (S), 19 responden atau sekitar 20,7 persen yang menjawab kurang setuju (KS), dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item ketujuh yang membahas tentang semua masyarakat desa telah mendapatkan bantuan keuangan maupun bantuan sosial dari dinas sosial maupun pemerintah pusat secara merata dari 92 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 22 responden atau sekitar 23,9 persen yang menjawab sangat setuju (SS), 48 responden atau sekitar 52,2 persen yang menjawab setuju (S), 22 responden atau sekitar 23,9 persen yang menjawab kurang setuju (KS), dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan tentang ringkasan data-data penelitian mean, minimum, maksimum, jumlah data (N), range, standar deviasi dan lain-lain. Hasil uji statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil analisis statistik deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Indeks kepuasan masyarakat	92	41	60	46,94	3,61
Realisasi alokasi dana desa	92	39	59	47,41	4,26
Valid N (Listwise)	92				

Sumber :Hasil Olah Data 2021

Dari tabel di atas ada beberapa penjelasan yang diperoleh yaitu 92 yang dijadikan responden, 2 (dua) variabel yaitu variabel indeks kepuasan masyarakat (X) dan variabel realisasi alokasi dana desa (Y) masing-masing memiliki nilai minimum pada masing-masing variabel yaitu 41 dan 39, sedangkan nilai maksimum pada masing-masing variabel yaitu 60 dan 59, dan nilai rata-rata (mean) dari setiap variabel adalah 46,94 (indeks kepuasan masyarakat) dan 47,41 (realisasi alokasi dana desa). Adapun standar deviasi setiap variabel yaitu 3,61 (indeks kepuasan masyarakat) dan 4,26 (realisasi alokasi dana desa).

4.5 Hasil Uji Validitas

Dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistik 28. Maka pengujian validitas instrumen dapat dilihat pada kolom *correlation* dengan kriteria yaitu :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan/pertanyaan dinyatakan valid
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan/pertanyaan dinyatakan tidak valid

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dilihat hasil olah data uji validitas dibawah ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Indeks Kepuasan Masyarakat (X)

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Indeks kepuasan masyarakat 1	0,434	0,2028	Valid
Indeks kepuasan masyarakat 2	0,468	0,2028	Valid
Indeks kepuasan masyarakat 3	0,414	0,2028	Valid
Indeks kepuasan masyarakat 4	0,593	0,2028	Valid
Indeks kepuasan masyarakat 5	0,430	0,2028	Valid
Indeks kepuasan masyarakat 6	0,481	0,2028	Valid
Indeks kepuasan masyarakat 7	0,545	0,2028	Valid
Indeks kepuasan masyarakat 8	0,387	0,2028	Valid

Indeks kepuasan masyarakat 9	0,604	0,2028	Valid
Indeks kepuasan masyarakat 10	0,610	0,2028	Valid

Sumber : Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan tabel 4.2.7 maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel (X) memiliki status valid karena r_{hitung} (Corrected Total Correlation) > lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,2028.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Realisasi alokasi Dana Desa (Y)

Item pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Realisasi alokasi dana desa 1	0,616	0,2028	Valid
Realisasi alokasi dana desa 2	0,700	0,2028	Valid
Realisasi alokasi dana desa 3	0,690	0,2028	Valid
Realisasi alokasi dana desa 4	0,616	0,2028	Valid
Realisasi alokasi dana desa 5	0,689	0,2028	Valid
Realisasi alokasi dana desa 6	0,661	0,2028	Valid
Realisasi alokasi dana desa 7	0,572	0,2028	Valid

Sumber : Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan tabel 4.2.7 maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel (X) memiliki status valid karena r_{hitung} (Corrected Total Correlation) > lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,2028.23

4.6 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan reliabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pernyataan selalu konsisten. Metode yang digunakan adalah metode Cronbach's Alpha. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 28. Adapun hasil uji reliabilitas masing-masing variabel sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil uji reliabilitas

No	variabel	Cronbach's alpha	Standar reliable/kriteria	Keterangan
1.	Indeks kepuasan masyarakat	0,718	0,60	Reliabel
2.	Realisasi alokasi dana desa	0,785	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan tabel 4.2.9 uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pernyataan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas pada Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 0,718 dan pada Realisasi Alokasi Dana Desa sebesar 0,785 ternyata memiliki nilai "cronbach's alpha" lebih besar dari 0,60 yang berarti bahwa kedua instrumen

dinyatakan reliabel atau memenuhi syarat, hal ini sesuai dengan metode Cronbach's Alpha (Juliansyah Noor,2012) metode ini diukur berdasarkan skala alpha cronbach's nol sampai satu, yang dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rentang yang sama dan salah satunya menyatakan bahwa “ jika nilai alpha cronbach 0,42 s.d 0,60 berarti cukup reliabel”.

4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian analisis regresi linear sederhana dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 28 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.462	3.378		1.321	.190
	indeks kepuasan masyarakat	.511	.074	.589	6.907	<,001

a. Dependent Variable: realisasi alokasi dana desa

Sumber : Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui konstanta (a) sebesar 4,462 sedangkan pendapatan (b/koeffisien regresi) sebesar 0,511 sehingga persamaan regresi dapat ditulis :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 4,462 + 0,511$$

Berdasarkan nilai sig. yang diperoleh dari tabel diatas yaitu 0,001 lebih kecil (kurang dari) 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan masyarakat (X) berpengaruh terhadap realisasi alokasi dana desa.

4.9 Pembahasan Hasil Penelitian

Desa tampumia merupakan desa yang terletak di daerah pegunungan atau dapat dikatakan sangat terpencil karena jauh dari pusat perkotaan. Jumlah penduduk yang ada di Desa Tampumia sebanyak 1225 jiwa yang tersebar di lima dusun yang ada di Desa Tampumia, dengan rincian jumlah penduduk masing-masing dusun Yaitu Dusun Tampumia sebanyak 323 jiwa, Dusun Padang Rura sebanyak 348 jiwa, Dusun Gantungan sebanyak 214 jiwa, Dusun Pollo Salu sebanyak 311 jiwa, Dusun Bunne sebanyak 29 jiwa, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sawah dan pekebun.

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Penelitian ini menguji hipotesis tentang Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa Di Desa Tampumia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Hasil pengujian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa:

Berdasarkan hasil uji Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (X) Terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa (Y) Di Desa Tampumia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, setelah dilakukan pengujian dapat diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap realisasi alokasi dana desa.

Sejalan dengan penelitian Fandi Alfiansyah Siregar S.Sos tahun 2018 yaitu Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa kepuasan masyarakat berpengaruh terhadap alokasi dana desa di desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo kabupaten Nias selatan. Dari hasil pengujian regresi linear sederhana menunjukkan nilai yang diperkuat dan didukung oleh nilai Sig. lebih kecil yaitu sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak.

Bila nilai signifikansi $t < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $t > 0.05$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa Di Desa Tampumia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu dan berbagai uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan valid karena korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 atau $\text{sig} < 0,05$ maka butir pernyataan tersebut dapat dikatakan valid dan jika korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi diatas 0,05 atau $\text{sig} > 0,05$ maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid.
2. Hasil Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrument yang dinyatakan reliabel dimana hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan cronbach alpha $> 0,06$ sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang handal atau dapat dipercaya.
3. Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa konstanta (a) sebesar 3,378 artinya tidak ada atau sama dengan nol maka realisasi alokasi dana desa (Y) sebesar 3,378 satuan. Sedangkan koefisien regresi variabel indeks kepuasan

masyarakat sebesar 0,511. Jika indeks kepuasan masyarakat mengalami kenaikan satu-satuan, maka berpengaruh terhadap realisasi alokasi dana desa sebesar 0,511 satuan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat di ajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. pemerintah desa sebagai fasilitator harus senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya.
2. Penulis menyarankan kepada pemerintah desa agar dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa harus secara transparan.
3. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa harus lebih ditingkatkan lagi karena tercapainya tujuan dari suatu instansi pemerintah yaitu masyarakat merasa puas dan merasakan manfaat yang diberikan oleh pemerintahnya.
4. Dana desa yang diterima tiap tahunnya harus dibuktikan secara nyata melalui pembangunan berkelanjutan.
5. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pemerintah desa harus terus melakukan terobosan pembangunan SDM melalui pemberdayaan masyarakat.

